

**EVALUASI POTENSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN  
SUKOHARJO**



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Akuntansi

Oleh :

**SUHARTININGSIH**

**B 200 050 299**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2009**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama kabupaten dan kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Agar lebih siap melaksanakan otonomi daerah, perlu proses pembelajaran bagi masing-masing daerah agar dapat mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan masing-masing daerah. Demikian pula dengan pemerintah pusat, sebagai pihak yang mengatur pengembangan konsep otonomi daerah, bertanggung jawab agar konsep otonomi daerah dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah membawa paradigma baru dalam pengelolaan daerah, daerah sudah diberikan kewenangan untuk mengatur sumber daya yang dimilikinya. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri.

Otonomi bagi pemerintah daerah telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk

mengatur daerahnya. Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengembangan potensi kemandirian daerah melalui PAD dapat tercermin dari kemampuan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat melalui pajak dan retribusi.

Pada era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah seperti sekarang ini, fungsi dan peran pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terasa sangat penting. Sejalan dengan otonomi daerah masalah perimbangan keuangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu elemen penting untuk dilakukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah akan semakin berperan dan semakin penting.

Kemandirian ini berupa kemandirian dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah, pada dasarnya menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu sama lain. Ketiga bidang analisis tersebut meliputi (**Mardiasmo:2000**) : 1) Analisis Penerimaan, yaitu analisis mengenai seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut; 2) Analisis Pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat; 3) Analisis

Anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Sedangkan kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan PAD. Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: propinsi, kabupaten, kotamadya) yang diatur berdasarkan peraturan daerah dan hasil pungutannya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya.

Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolok ukur yang riil terjadi di lapangan dan secara konkrit dikehendaki oleh masyarakat di daerah. Salah satu tolok ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah ini biasanya diukur dari besarnya proporsi/kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah, maka pihak pemerintah daerah kabupaten Sukoharjo melalui BPKD berupaya untuk meningkatkan PAD kabupaten Sukoharjo dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah yang sudah ada.

Berdasar pada uraian latar belakang di atas, dalam penelitian ini peneliti mengambil judul: **Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sukoharjo.**

## **B. Perumusan Masalah**

**Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan diuraikan adalah:**

1. Seberapa besarkah potensi pajak daerah sebagai sumber PAD di Kabupaten Sukoharjo ?
2. Seberapa besarkah kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Sukoharjo ?
3. Sejauh mana efektifitas yang dihasilkan dari sistem pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sukoharjo ?

## **C. Pembatasan Masalah**

Target dan realisasi pendapatan daerah kabupaten Sukoharjo yang bersumber dari pemerintah kabupaten Sukoharjo selama tahun anggaran 2003/2004-2007/2008.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang diketengahkan adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya potensi pajak daerah sebagai sumber PAD di Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah yang diberikan terhadap PAD di Kabupaten Sukoharjo.

3. Untuk mengetahui efektifitas yang dihasilkan dari pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sukoharjo.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan guna meningkatkan pajak daerah.
2. Bagi Masyarakat Kabupaten Sukoharjo diharapkan tercipta suatu kesadaran akan arti pentingnya pajak daerah dalam kaitannya dengan pemberlakuan otonomi daerah.

#### **F. Sistematika Skripsi**

##### **Bab I      Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika skripsi.

##### **Bab II     Tinjauan Pustaka**

Berisi tentang pengertian sumber pendapatan daerah, pengertian pajak daerah, jenis-jenis pajak daerah, pengertian potensi, pengertian efektifitas.

##### **Bab III    Metode Penelitian**

Berisi tentang objek, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

##### **Bab IV    Analisis Data dan Pembahasan**

Berisi tentang gambaran umum kabupaten Sukoharjo, pajak daerah di kabupaten Sukoharjo, target dan realisasi penerimaan

pajak daerah meliputi potensi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, efektifitas penerimaan pajak daerah.

## **Bab V** Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran.